

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2025

2024

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.12 NO.69
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala karena atas perkenan-Nya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 ini.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Akhir Tahun 2025, berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 ini, telah dilakukan penyesuaian sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPD.

Dalam proses penyusunan Renja Akhir ini, Dinas melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan, Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Bidang Ketransmigrasian, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan UPT Balai Pelatihan Kerja, mengakomodir usulan Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang)/Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penyusunan Rencana Kerja Akhir ini. Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala membalas kerja keras kita semua.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Renja Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah	44
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	49
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Permasalahan dalam upaya pengembangan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	16
Tabel	2.2	Interpretasi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	20
Tabel	2.3	Isu-isu strategis (permasalahan pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian)	25
Tabel	2.4	TC-32. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2025	28
Tabel	3.1	Indikator Kinerja Utama	31
Tabel	3.2	Sustainable Development Goals (SDGs)	33
Tabel	3.3	Matrix Gender Analysis Pathway (GAP) Disnakertrans Tahun 2025	35
Tabel	3.4	Pernyataan Anggaran Gender Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker berdasarkan Kluster Kompetensi	39
Tabel	3.5	Gender Budget Statement Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	41
Tabel	4.1	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47
Tabel	4.2	Indikator Kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja	47
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	48
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja	48
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Program Hubungan Industrial	48
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Program Pengawasan	48
Tabel	4.7	Indikator Kinerja Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	49
Tabel	4.8	Indikator Kinerja Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	49
Tabel	4.9	Indikator Kinerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49
Tabel	4.10	Rencana Anggaran Belanja Program	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu unsur dari manajemen, adalah merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk jangka waktu satu tahun.

Dalam proses penyusunan dokumen rencana kerja ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan yang berasal dari bawah keatas (bottom up planning), partisipatif, politis dan teknokratis. Dokumen RENJA ini merupakan penjabaran dalam rangka memenuhi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Organisasi Perangkat Daerah Baru) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Olehnya itu, RENJA bagi suatu organisasi pemerintah tidak dapat dikesampingkan didalam mencapai tujuan organisasi atau pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam RENJA ini juga diuraikan lebih rinci lagi dari Perencanaan Strategis (Strategic Planning) untuk menjadi penuntun Manajemen Kinerja (Performance Management) dengan maksud supaya seluruh anggota organisasi dapat mengetahui capaian kinerja yang diinginkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi / lembaga pemerintah.

Disamping itu, RENJA ini juga memuat sasaran yang ingin dicapai pada periode satu tahun, dengan indikator pencapaian sasaran target, program dan organisasi. Kesemuanya ini merupakan instrument untuk menilai, melihat dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di bebankan.

Lebih lanjut diuraikan bahwa RENJA ini sangat erat kaitannya dengan Renstra **Perangkat Daerah**, Renstra K/L maupun Renstra Provinsi. Penjabaran program dan kegiatan yang diuraikan dalam RENJA ini adalah sinkronisasi terhadap program kegiatan yang tertuang dalam Renstra **Perangkat Daerah**, Renstra K/L maupun Renstra Provinsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana gambaran usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta target yang diinginkan sekaligus sebagai bahan tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, Regional maupun Tingkat Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Akhir ini antara lain :

- Sebagai pedoman dalam melaksanakan rencana program kegiatan satu tahun kedepan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dapat diukur pencapaiannya.
- Khusus untuk program kegiatan yang menggunakan APBD, RENJA ini adalah sebagai bahan acuan untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian ditetapkan sebagai Plafond Anggaran Definitif. Dari penetapan Plafond Anggaran Definitif kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD) untuk dibahas secara bersama-sama dengan Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, dari hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini, pembahasan diuraikan dalam beberapa bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

Pendahuluan

Pada bab ini memuat **latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan**, yang menjelaskan pengertian rencana kerja perangkat daerah secara ringkas, menguraikan bagaimana proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah serta menjelaskan keterkaitan antara rencana kerja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, Renja K/L serta tindak lanjut dalam penyusunan RAPBD. Landasan hukum memuat pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja serta kewenangan perangkat daerah. **Maksud dan tujuan**, menjelaskan apa maksud dibuatnya rencana kerja perangkat daerah serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. **Sistematika penulisan**, memudahkan dalam Menyusun rencana kerja, sehingga diperoleh sajian data yang jelas, detail dan akurat terhadap rencana kerja yang disusun.

Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat **evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra opd, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi opd, review terhadap rancangan awal rkpd, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**.

Bab ini menjelaskan review terhadap hasil **evaluasi pelaksanaan rencana kerja daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)**, menjelaskan capaian target/realisasi renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil analisis antara target dan realisasi. **Analisis kinerja pelayanan OPD** menjelaskan gambaran umum pelayanan OPD, capaian kinerja OPD yang didasarkan atas hasil evaluasi, serta SPM dan IKK pelayanan OPD. **isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi opd**, menjelaskan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan/hambatan yang dialami, tantangan/peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan isu-isu penting berupa rekomendasi/catatan strategis dalam perumusan program/kegiatan tahun berikutnya. **Review terhadap rancangan awal rkpd** menjelaskan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta menjelaskan alasan proses tersebut dilakukan, menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. **Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat** menjelaskan proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat *telaahan terhadap kebijakan nasional* yaitu penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi OPD.

Bab ini juga menjelaskan tujuan serta sasaran renja perangkat daerah dimana rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra perangkat daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, dan pendanaan perangkat daerah. Menjelaskan uraian program/kegiatan, indicator kinerja, kebutuhan pagu indikatif, sumber dana, kelompok sasaran, dan lokasi kegiatan.

Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan penjabaran dan tindak lanjut, penanggung jawab pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah

B A B II

HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Renja Perangkat

Bagian penting dalam pengelolaan pembangunan adalah evaluasi yang valid atas pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan kearah tepatnya sasaran.

Dalam upaya validnya evaluasi yang dilakukan maka langkah akhir yang dilakukan adalah menetapkan indikator kinerja yang menggambarkan secara tepat keadaan-keadaan sebab akibat dalam strategi pembangunan. Indikator-indikator kinerja sedemikian rupa merupakan besaran-besaran yang dapat diukur sehingga dapat mencerminkan sebab akibat tersebut.

Secara jelas, uraian mengenai evaluasi capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun lalu (n-2 = tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1 = tahun 2023) dapat dilihat pada **TABEL T-C.29 (terlampir).**

Capaian Kinerja Program Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Persentase provinsi Kab/Kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro sebesar 75% tidak mencapai target, karena dari 24 kabupaten/kota yang diharapkan menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja, hanya 18 kabupaten yang menyusun, 5 Kabupaten telah habis masa berlakunya dan 1 kabupaten tidak menyusun PTKD.
- Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro sebesar 15%. Dari jumlah perusahaan yang dikunjungi sebanyak 20 perusahaan, ada 3 perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro. Pengembangan perusahaan mereka mulai dari pegawai, jabatan, beban kerja semua berdasarkan perencanaan tenaga kerja mikro perusahaan.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan sebesar 82%. Jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 140 orang dan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 116 orang.
- Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri sebesar 100%. Jumlah tenaga kerja yang dilatih kewirausahaan sebanyak 80 orang dan 80 orang yang telah mandiri berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh UPT BPK.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah 9,69%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sampai Desember tahun 2023 sebanyak 342.826 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 33.216 orang.
- Persentase daya serap tenaga kerja sebesar 62.82%, dimana jumlah penduduk usia kerja sebanyak 7.149.200 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.490.983 orang. Data menggunakan data BPS pada Agustus 2023.

4. Program Hubungan Industrial

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 67,42%, persentase ini didapatkan dari jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebanyak 27.157 perusahaan dibagi jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan.
- Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 21,85%, yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 339 kasus yang terdiri dari : perselisihan hak 82 kasus, perselisihan kepentingan 9 kasus, perselisihan phk 248 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 80 kasus .
- Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 47,48%. Capaian kegiatan adalah Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon dari proyeksi PU, BPU dan Jakon. Jumlah pekerja berdasarkan proyeksi sebanyak 2.752.744 orang yang terdiri dari PU : 1.155.406 orang, BPU : 1.327.450 orang dan Jakon : 269.888 orang. Sedangkan pekerja yang telah mengikuti program Jamsostek sebesar 1.307.018 orang yang terdiri dari PU ; 844.393 orang, BPU : 259.684 orang dan Jakon : 202.941 orang.

5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Persentase penurunan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja sebesar 87,16% yang diperoleh dari jumlah perusahaan diwilayah kab/kota yang tercatat dan jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3. Ada 6.324 perusahaan yang tercatat yang ada di kab/kota dan ada 5.512 perusahaan yang telah menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Persentase kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan sebesar 84,29% yang diperoleh dari Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa. Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan dan 33.954 perusahaan yang telah diperiksa dan telah menerapkan

norma ketenagakerjaan. Capaian kinerja pada indikator ini tidak tercapai karena beberapa hal antara lain kurangnya tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diperiksa.

6. Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Terpenuhinya semua dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen pelaporan, pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah, pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah, pelayanan administrasi umum perangkat daerah, sapras, dan pelayanan jasa. Persentase capaian 100%
- Dari total jumlah ASN yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki nilai skp kategori baik dan sangat baik yaitu 100%. Persentase capaian 100%
- Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti adalah 100%, terdapat 9 laporan hasil pemeriksaan dan semuanya telah ditindaklanjuti.

7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja program meliputi :

- Capaian kinerja program berupa telah dilakukan survey terhadap lahan lokasi transmigrasi di Bontomatinggi dan Bontomarannu Kabupaten Maros yang merupakan penyelesaian masalah lahan yang telah diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan.

8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja program sebesar 100%, yang meliputi :

- Capaian kinerja program yaitu terlaksananya penempatan transmigrasi dengan target 139 kk dan semua telah ditempatkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - TPA sebanyak 15 kk 59 jiwa, dengan penempatan :
 - ✓ 4 kk 14 jiwa dari Lampung penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C
 - ✓ 3 kk 12 jiwa dari Jawa Tengah penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur
 - ✓ 3 kk 14 jiwa dari Jawa Timur penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap
 - ✓ 2 kk 8 jiwa dari DKI penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap
 - ✓ 3 kk 11 jiwa dari Jawa Tengah penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap
 - TPS sebanyak 20 kk 80 jiwa, dengan penempatan :
 - ✓ 8 kk 32 jiwa penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur
- 12 kk 48 jiwa penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap

9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja program sebesar 100%, yang meliputi :

- Masyarakat/transmigran yang telah dilatih pembinaan usaha ekonomi diharapkan dapat lebih mandiri, dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan

- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia. Pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi di Kimtrans Watu Kabupaten Soppeng, Kimtrans Wala Kabupaten Sidrap, Kimtrans Supi Kabupaten Tana Toraja dan Kimtrans Rante Karua Kabupaten Toraja Utara.
- Tersedianya data sarana prasarana lokasi permukiman transmigrasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembahasan mengenai sub bab ini menitikberatkan pada pencapaian kinerja pelayanan **Perangkat Daerah** berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Data capaian kinerja program pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Urusan Ketenagakerjaan Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	%	95,83	95,83	91,67	66,7	75
Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	10	12	12
Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	73	83,33	82
Tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	81,25	100	100
Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	4,36	3,29	5,60	9,49	9,69
Daya serap tenaga kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	20,27	61,58	63,19	62,82
Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	63,38	67,42
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	%	63,55	77,99	47,12	49,43	47,48
Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	62,59	87,16
Kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	%	Belum dilakukan pengukuran	Belum dilakukan pengukuran	100	100	84,29

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Walaupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki SPM, tetapi berikut dijelaskan jenis indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, yaitu sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Pelatihan Kerja
 - Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan sebesar 100%
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
 - Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah 9,69%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sampai Desember tahun 2023 sebanyak 342.826 orang yang terdiri dari tahun 2022 sebanyak 301.722 dan Desember 2023 sebanyak 33.216 orang.
 - Persentase daya serap tenaga kerja sebesar 62,82%, dimana jumlah penduduk usia kerja sebanyak 7.149.200 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.490.983 orang. Data menggunakan data BPS pada Agustus 2023.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 67,42%, persentase ini didapatkan dari jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebanyak 27.157 perusahaan dibagi jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan.
 - Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 21,85%, yang diukur dari jumlah kasus yang dicatatkan sebanyak 339 kasus yang terdiri dari : perselisihan hak 82 kasus, perselisihan kepentingan 9 kasus, perselisihan phk 248 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebanyak 80 kasus .
 - Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 47,48%. Capaian kegiatan adalah Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon dari proyeksi PU, BPU dan Jakon. Jumlah pekerja berdasarkan proyeksi sebanyak 2.752.744 orang yang terdiri dari PU : 1.155.406 orang, BPU : 1.327.450 orang dan Jakon : 269.888 orang. Sedangkan pekerja yang telah mengikuti program Jamsostek sebesar 1.307.018 orang yang terdiri dari PU ; 844.393 orang, BPU : 259.684 orang dan Jakon : 202.941 orang.
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
 - Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 47,48%. Capaian kegiatan adalah Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon sebesar 1.307.018 orang dari proyeksi PU, BPU dan Jakon sebanyak 2.752.744 orang

5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja sebesar 87,16% yang diperoleh dari jumlah perusahaan diwilayah kab/kota yang tercatat dan jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3. Ada 6.324 perusahaan yang tercatat yang ada di kab/kota dan ada 5.512 perusahaan yang telah menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - Persentase Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan sebesar 84,29% yang diperoleh dari Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa. Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan dan 33.954 perusahaan yang telah diperiksa dan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Capaian kinerja pada indikator ini tidak tercapai karena beberapa hal antara lain : Kurangnya tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diperiksa.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dinas yang ada pada organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Terbentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Dinas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 didukung oleh 190 personil, yang terdiri dari :

a.	Sekretariat	=	27 Orang
b.	Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan	=	11 Orang
c.	Bidang HI	=	12 Orang
d.	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	=	9 Orang
e.	Bidang Ketransmigrasian	=	9 Orang
f.	UPT Balai Pelatihan Kerja	=	10 Orang
g.	UPT Pengawasan Wilayah I	=	5 Orang
h.	UPT Pengawasan Wilayah II	=	5 Orang
i.	UPT Pengawasan Wilayah III	=	6 Orang
j.	UPT Pengawasan Wilayah IV	=	5 Orang

k.	F. Instruktur	=	6 Orang
l.	F. Mediator	=	9 Orang
m.	F. Pengantar Kerja	=	15 Orang
n.	F. Pengawas	=	52 Orang
o.	F. PSM	=	6 Orang
p.	F. Arsiparis	=	3 Orang

J U M L A H = 190 Orang

Untuk tingkat golongan, dukungan personil dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

a.	Golongan IV	=	80 Orang
b.	Golongan III	=	102 Orang
c.	Golongan II	=	4 Orang
d.	Golongan I	=	- Orang
e.	PPPK	+	4 Orang

J U M L A H = 190 Orang

Untuk tingkat pendidikan, dukungan personil terdiri dari :

a.	SD	=	- Orang
b.	SLTP	=	- Orang
c.	SLTA	=	10 Orang
d.	D1/D3	=	2 Orang
e.	D4/S1	=	112 Orang
f.	S2	=	63 Orang
g.	S3	=	3 Orang

J U M L A H = 190 Orang

Untuk tingkat jabatan / eselon, dukungan personil terdiri atas :

a.	Eselon II	=	1
b.	Eselon III	=	10 Orang
c.	Eselon IV	=	23 Orang
d.	Pejabat Fungsional	=	91 Orang
e.	Fungsional Umum/Staf	=	65 Orang

J U M L A H = 190 Orang

Sedangkan dukungan personil berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas :

a.	Laki- Laki	=	109 Orang
b.	Perempuan	=	81 Orang

J U M L A H = 190 Orang

Kemudian tugas Kepala Dinas dijabarkan kedalam struktur organisasi dan tugas pokok yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, susunan organisasi dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan, meliputi :
 - Seksi Kompetensi tenaga Kerja
 - Seksi Perluasan Kesempatan Kerja :
- d. Bidang Hubungan Industrial, meliputi :
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan
 - Seksi Jaminan Sosial
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi :
 - Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- f. Bidang Ketrasmigrasian :
- g. Jabatan Fungsional

2. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

"Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah"

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing – masing sebagai berikut :

- a. **Sekretariat** : dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
2. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan
3. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum
4. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

- b. **Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas bidang Bidang Pengembangan Tenaga Kerja mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
4. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pelatihan, pemagangan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

- c. **Bidang Hubungan Industrial** di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Hubungan Industrial
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Industrial
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Hubungan Industrial
4. pelaksanaan administrasi Bidang Hubungan Industrial
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
4. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

e. Bidang Ketrasmigrasian di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Ketrasmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas bidang Ketrasmigrasian mempunyai fungsi yaitu

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Ketrasmigrasian
2. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketrasmigrasian
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketrasmigrasian
4. pelaksanaan administrasi Bidang Ketrasmigrasian
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Disamping ke 5 (lima) bidang tersebut diatas, Disnakertrans di bantu oleh 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah merupakan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan dan pendataan objek pengawasan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dibentuk sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 49 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang terbagi menjadi 4 Wilayah yaitu Wilayah I (berkedudukan di Kota Pare-Pare dengan wilayah pelayanan meliputi Kab. Barru, Kota Pare-Pare, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap dan Kab. Enrekang) ; Wilayah II (berkedudukan di Kota Palopo dengan wilayah pelayanan

meliputi Kab. Tator, Kab. Toraja Utara, Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur) ; Wilayah III (berkedudukan di Kab. Bone dengan wilayah pelayanan meliputi Kab. Wajo, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Sinjai); Wilayah IV (berkedudukan di Kab. Bulukumba dengan wilayah pelayanan meliputi Kab. Selayar, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto);

- b. **UPT BPK (Balai Pelatihan Kerja)** merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja. UPT BPK dibentuk sesuai sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 47 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, **terdapat perubahan** dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan akan ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan. Disamping itu, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan juga tetap menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Walaupun terjadi perubahan pengalihan status Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi namun dari sisi perencanaan program kegiatan tidak mengalami perubahan. Adapun faktor yang mengalami perubahan atau terkena dampak dari pengalihan status tersebut adalah dari sisi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan pokok yang tentunya akan membutuhkan anggaran yang cukup besar.

- a. Sinergi Program PD Provinsi dengan PD Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga
- Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kab/kota dan pemerintah pusat. Bentuk kerja sama yaitu tertuang dalam program kegiatan perangkat daerah, antara lain :
- Program Perencanaan Tenaga Kerja, pada program ini, unsur kementerian memberikan petunjuk/arahan/saran terkait penyusunan rencana tenaga kerja makro dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro. Unsur provinsi memberikan bimbingan teknis terkait peningkatan SDM kab/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja mikro.

- Program Penempatan Tenaga Kerja, pada program ini, peran kab/kota sangat mendukung tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan (lowongan, pencari kerja, penempatan tenaga kerja).
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Kab/kota berperan dalam membantu suksesnya pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dengan menyiapkan peserta dan narasumber untuk melatih pencari kerja agar dapat berwirausaha dan dapat meningkatkan produktivitas mereka.
 - Program Hubungan Industrial. Peran Kab/kota melalui LKS Bipartit dan LKS Tripartit.
 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Kementerian/Kab/Kota mendukung penyelesaian kasus terutama K3.
 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Kementerian memberikan anggaran APBN dalam mendukung pembangunan permukiman kawasan transmigrasi. Kab/kota mendukung dengan menyiapkan lahan dan membangun RTJK di lokasi transmigrasi.
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kementerian memberikan anggaran APBN dalam mendukung pembangunan permukiman kawasan transmigrasi. Dukungan kab/kota melalui kerja sama dengan OPD terkait di kab/kota untuk memasukkan kegiatan pada lokasi transmigrasi.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas fungsi perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1. Permasalahan dalam upaya pengembangan pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

No	Isu Strategis	Permasalahan	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja	- Rendahnya kualitas / ketrampilan angkatan kerja / pencari kerja - Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi tenaga kerja - Kurangnya inovasi	- Tingkat pengangguran tertinggi ada pada lulusan D3 dan SMK / SMA - Masih rendahnya kualitas, ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	- Melaksanakan pelatihan vokasi khusus sekolah kejuruan - Memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
2	Tingginya Tingkat Pengangguran	- Banyaknya tambahan angkatan kerja	- Penambahan jumlah angkatan kerja tidak	- Kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung

	Terbuka	- Banyaknya pekerja dengan status informal - Terbatasnya Lapangan Pekerjaan	dibarengi dengan berkembang lapangan kerja - Kemiskinan - Serbuan TKA di Pasar Kerja - PHK	aplikasi SIAP KERJA yang berfungsi menyediakan informasi ketenagakerjaan baik lowongan kerja dalam dan luar negeri maupun data pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan TKA - Pemulihan ekonomi perusahaan agar tidak ada lagi PHK pasca covid-19
3	Belum maksimalnya pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	- Masih tingginya kasus kasus ketenagakerjaan. - Penerapan Norma K3 ditempat kerja masih belum optimal, sehingga budaya K3 belum menjadi budaya kerja di perusahaan - Belum maksimalnya penerapan aturan hubungan antar kerja serta perlindungan pekerja perempuan dan anak	- Kualitas dan Kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan masih kurang dibanding jumlah perusahaan yang terdaftar - Masih kurangnya pemahaman Perusahaan terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan	- Menambah jumlah pejabat fungsional pengawas dan meningkatkan kualitas pengawas dengan pelatihan kompetensi pengawas ketenagakerjaan. - Meningkatkan sosialisasi ke perusahaan terkait K3. - Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan menindakk tegas perusahaan yang tidak menerapkan Norma Ketenagakerjaan
4	Belum kondusifnya hubungan industrial dan rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha maupun syarikat pekerja/buruh dalam pelaku	- Masih tingginya kasus-kasus HI seperti PHK, PHI, Kepentingan dan Hak. - Belum optimalnya respon kab/kota terhadap pembentukan LKS Tripartit - Rendahnya	- Terbatasnya tenaga mediator Hubungan Industrial - Kurangnya sosialisasi ke perusahaan terkait regulasi jamsostek dan UMP. - Tidak adanya kesepahaman	- Menambah pejabat fungsional mediator dan meningkatkan kualitas mereka dengan pelatihan kompetensi bagi mediator - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi/kab/kota/LKS Bipartit/LKS

	hubungan industrial	keikutsertaan tenaga kerja/buruh ke dalam jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) - Masih rendahnya tingkat pengupahan di perusahaan	antara pihak buruh dan pengusaha - Koordinasi antar stakeholder masih belum berjalan dengan baik	Tripartite/Dewan Pengupahan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis
5	Tingkat kesejahteraan warga transmigrasi masih rendah	- Sumberdaya manusia transmigran kadang tidak sesuai dengan kondisi pola mata pencaharian yang ada dilokasi - Lahan transmigrasi yang terbatas	- Perekrutan calon warga transmigrasi berorientasi ke proyek sehingga prosedur pendaftaran dan seleksi tidak berjalan secara optimal	- Meningkatkan pengawasan terhadap MoU yang tertuang dalam KSAD antara provinsi penerima dan provinsi pengirim - Meningkatkan kualitas dalam pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi - Inventarisasi rumah dan lahan bagi masyarakat setempat yang berpotensi menjadi calon TPS

Masalah utama yang dihadapi sektor ketenagakerjaan adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya daya saing tenaga kerja. Ada beberapa faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah ketidak sesuaian hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran terhadap jasa manusia dan kualitas sumber daya manusia. Penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja adalah rendahnya kualitas/ketrampilan tenaga kerja.

Sementara masalah utama yang dihadapi transmigrasi adalah rendahnya pendapatan transmigrasi disebabkan terbatasnya lahan yang dikelola, dan proses seleksi transmigrasi di daerah asal tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan masih menunjukkan daya saing yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi khususnya di daerah Jawa dan Sumatera, sehingga belum mampu bersaing baik didalam negeri maupun diluar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja disebabkan rendahnya mutu SDM, dimana mutu SDM dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki kompetensi kerja. Berdasarkan data Sakernas yang diterbitkan oleh BPS pada bulan Agustus Tahun 2024, bahwa dari TPT, tingkat pengangguran tertinggi ada sebanyak 9,01 % berpendidikan DI/II/III, 7,61% berpendidikan SMK, dan 6,29% berpendidikan D4/S1/S2/S3, 5,86% berpendidikan SMA, 2,44% berpendidikan SMP dan 1,65% berpendidikan SD. Tingginya penganggur pada tingkat

Diploma I/II/III, menunjukkan bahwa peluang kerja/lowongan di pasar kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan/kompetensi/keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan TPT penduduk tamatan pendidikan menengah ke Atas (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3) dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024 menunjukkan pola selalu lebih tinggi dibanding TPT penduduk tamatan pendidikan dasar ke bawah (SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama). Pada Agustus 2024, TPT tamatan Diploma I/II/III merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,01 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,65 persen. Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP dan SMA, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 1,59 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT dengan peningkatan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III sebesar 3,82 persen poin.

Capaian SDGs dalam mendukung pencapaian visi misi kepala daerah, yaitu :

1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan target sebesar 46,81% dan capaian sebesar 49,43%.
2. Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah/jam) target NA dan capaian sebesar 15196
3. Tingkat setengah pengangguran target NA dan capaian 6,23%
4. Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin Laki-Laki target 35,08 dan capaian sebesar 35,17
5. Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin Perempuan target 30,35 dan capaian sebesar 26,33. Target tidak tercapai karena perkembangan teknologi pertanian, dimana dahulu tenaga kerja wanita masih banyak dimanfaatkan mulai dari proses tanam sampai panen, namun karena perkembangan teknologi pertanian sehingga tenaga kerja wanita menjadi berkurang. Rencana tindak lanjut untuk permasalahan ini yaitu tenaga kerja wanita pada sektor pertanian beralih ke sektor jasa karena sektor jasa lebih fleksibel untuk perempuan. Untuk itu peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi perempuan sangat diperlukan melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, KMU, pelatihan bagi pencaker dan pelatihan disabilitas.
6. Persentase tenaga kerja formal target 41,26 dan capaian sebesar 36,45. Target tidak tercapai dimana factor penghambatnya adalah (1) pertumbuhan angkatan kerja baru yang lebih tinggi dibanding ketersediaan angkatan kerja formal (2) arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap disektor industry (3) Banyaknya perusahaan yang tutup pasca covid sehingga banyak yang terkena PHK. Upaya tindak lanjutnya adalah (1)

- kemudahan investasi dan pembukaan lapangan kerja (2) pelaksanaan job fair (3) peningkatan kualitas, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
7. Persentase tenaga kerja informal sector pertanian target 35,20 dan capaian sebesar 35,96
 8. Persentase usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan, target 20,76 dan capaian sebesar 22,61. Menurun tetapi berdampak positif, dimana hal ini disebabkan mereka melanjutkan sekolah atau memperoleh keterampilan untuk bekerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun dan mengikutkan mereka dalam pelatihan kerja.
 9. Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Tidak ada data karena tidak dilakukan survey.
 10. Proporsi tenaga kerja pada industry manufaktur target 16,80 dan capaian sebesar 15,45.

Tabel. 2.2. Interpretasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Bidang urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (-) Melampaui (>)	Permasalahan	Keterangan
I.	TENAGA KERJA			
1	% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi	Target 100% Realisasi : 75 Belum tercapai (<)	Ada 18 Kab/Kota yang masih berlaku, 5 Kab/Kota yang habis masa berlaku RTK dan 1 Kab. yang tidak menyusun	Kab/kota wajib menyusun rencana tenaga kerja makro
2	% Pencari kerja yang terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Target 77.08% Realisasi : 82% Melampaui (>)		Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan sebesar 82%. Jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 140 orang dan jumlah pencari kerja yang dilatih yang telah mendapatkan pekerjaan sebanyak 116 orang
3	% Tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Target 85% Realisasi : 100% Melampaui (>)		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri sebesar 100%. Jumlah tenaga kerja yang dilatih kewirausahaan sebanyak 80 orang, dan

				mereka sudah dapat berwirausaha sebagai wirausaha pemula.
4	% Pencari kerja yang ditempatkan	Target 4,35% Realisasi 9,69% Melampaui (>)		Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah 9,69%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 342.826 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 33.216 orang yang terdiri dari Job Fair 746 orang, perusahaan sebanyak 3.088 orang, Online 448 orang, AKAD sebanyak 4.990 orang, AKL sebanyak 246 orang, Kab/Kota sebanyak 11.077 orang dan OPD terkait Sulsel sebanyak 12.621 orang
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Target 59,41% Realisasi 62,82% Melampaui (>)		Persentase daya serap tenaga kerja sebesar 62,82%, dimana jumlah penduduk usia kerja sebanyak 7.149.200 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 4.490.983 orang. Data masih menggunakan data BPS pada Agustus 2023
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundang undangan dibidang ketenagakerjaan	Target 60% Realisasi 67,42% Melampaui (>)		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebesar 67,42%, persentase ini didapatkan dari jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebanyak 27.157 perusahaan dibagi jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP

				Online sebanyak 40.283 perusahaan.
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Target 47,22% Realisasi 47,48% Melampaui (>)	-	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi Program Jamsostek adalah sebesar 47,48%. Capaian kegiatan adalah Jumlah pekerja yang mengikuti Program Jamsostek meliputi PU, BPU dan Jakon dari proyeksi PU, BPU dan Jakon. Jumlah pekerja berdasarkan proyeksi sebanyak 2.752.744 orang yang terdiri dari PU : 1.155.406 orang, BPU : 1.327.450 orang dan Jakon : 269.888 orang. Sedangkan pekerja yang telah mengikuti program Jamsostek sebesar 1.307.018 orang yang terdiri dari PU ; 844.393 orang, BPU : 259.684 orang dan Jakon : 202.941 orang.
8	Persentase penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Target 85% Realisasi 87,16% Melampaui (>)		% Penurunan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja sebesar 87,16% yang diperoleh dari jumlah perusahaan diwilayah kab/kota yang tercatat dan jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3. Ada 6.324 perusahaan yang tercatat yang ada di kab/kota dan ada 5.512 perusahaan yang telah menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
9	Persentase kepatuhan penerapan norma	Target 84% Realisasi 84.29%		% Kepatuhan Penerapan Norma

	ketenagakerjaan	Melampaui (>)		Ketenagakerjaan sebesar 84,29% yang diperoleh dari Jumlah perusahaan yang terdaftar di WLKP Online dan jumlah perusahaan yang telah diperiksa. Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online sebanyak 40.283 perusahaan dan 33.954 perusahaan yang telah diperiksa dan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Capaian kinerja pada indikator ini tidak tercapai karena beberapa hal antara lain: Kurangnya tenaga fungsional pengawas ketenagakerjaan. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diperiksa.
II	TRANSMIGRASI			
1	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	Target 100% Realisasi 100% Sesuai (=)		Capaian kinerja program adalah telah dilakukan survey terhadap lahan lokasi transmigrasi di Bontomatinggi dan Bontomarannu Kabupaten Maros yang merupakan penyelesaian masalah lahan yang telah diklarifikasi terhadap tata batas kawasan

				hutan
2	Persentase penempatan transmigrasi	Target 100% Realisasi 100% Sesuai (=)		Capaian kinerja program yaitu terlaksananya penempatan transmigrasi dengan target 139 kk dan semua telah ditempatkan, dengan rincian sebagai berikut : ➤ TPA sebanyak 15 kk 59 jiwa, dengan penempatan : ✓ 4 kk 14 jiwa dari Lampung penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C ✓ 3 kk 12 jiwa dari Jawa Tengah penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur ✓ 3 kk 14 jiwa dari Jawa Timur penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap ✓ 2 kk 8 jiwa dari DKI penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap ✓ 3 kk 11 jiwa dari Jawa Tengah penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap ✓ TPS sebanyak 20 kk 80 jiwa, dengan penempatan : 8 kk 32 jiwa penempatan UPT Mahalona SP.1 SKP C Kabupaten Luwu Timur dan 12 kk 48 jiwa

				penempatan UPT Wala/Lagading Kabupaten Sidrap
3	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Target 100% Realisasi 100% Sesuai (=)		Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Lokasi Transmigrasi di Kimtrans Watu Kabupaten Soppeng, Kimtrans Wala Kabupaten Sidrap, Kimtrans Supi Kabupaten Tana Toraja dan Kimtrans Rante Karua Kabupaten Toraja Utara. Diharapkan dengan adanya pelatihan, transmigran dapat lebih mandiri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
4	Ketersediaan data sarana dan prasarana	Target 100% Realisasi 100% Sesuai (=)		Tersedianya data sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi

Sedangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Isu-Isu Strategis (Permasalahan Pembangunan Daerah
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian)
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Tafsiran Capaian Target	Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Penurunan angka sengketa pengusaha-pekerja	- Tidak adanya kesepakatan tentang upah antara pengusaha dengan tenaga pekerja - Sarana hubungan industrial di perusahaan belum berjalan sesuai peran dan fungsinya	- Penetapan upah minimum regional yang disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan - Peningkatan peran dan fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Pihak yang berselisih kurang memahami aspek positif / penyelesaian perselisihan lewat PB	Peningkatan pemahaman pihak yang berselisih tentang aspek positif penyelesaian perselisihan melalui Perjanjian Bersama

3.	Besaran Pencari kerja yang ditempatkan	Peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja	Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja
4.	Keselamatan dan perlindungan	Peningkatan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	Terbatasnya jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 di setiap unit kerja melalui pembinaan dan pengawasan
5.	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Peningkatan kepesertaan jamsostek / bpjs ketenagakerjaan bagi tenaga kerja / buruh	- Terbatasnya kepesertaan jamsostek / bpjs ketenagakerjaan bagi tenaga kerja - Belum semua pekerja / buruh di perusahaan didaftarkan dalam kepesertaan jamsostek / bpjs ketenagakerjaan	Peningkatan jumlah pekerja yang didaftarkan dlm kepesertaan Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan jumlah perselisihan buruh dan pengusaha yang ditangani akibat kebijakan pemerintah daerah	Tidak adanya kesepahaman antara pihak buruh dan pengusaha	Peningkatan pembinaan kepada pekerja/buruh dan pengusaha
7.	Besaran pemeriksaan Perusahaan	Peningkatan jumlah pemeriksaan di perusahaan	Kualitas dan Kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan masih kurang dibanding jumlah perusahaan yang terdaftar	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan
8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Peningkatan jumlah pengujian peralatan di perusahaan	Terbatasnya jumlah peralatan perusahaan yang diuji	
9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Modul / materi belum disesuaikan dengan kebutuhan / kondisi pasar kerja	Peningkatan kualitas SDM Instruktur yang disesuaikan dengan kondisi / kebutuhan pasar kerja
10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan	- Keterbatasan modal usaha - Akses pemasaran produk	- Penyediaan / bantuan modal usaha - Keterlibatan instansi terkait dalam pemasaran produk
11.	Besaran penempatan / pembinaan transmigran	Peningkatan jumlah penempatan dan pembinaan transmigrasi	- Ketersediaan lahan permukiman dan lu yang terbatas - Kurangnya minat masy u/ bertransmigrasi	- Kejelasan program dari segi potensi permukiman, akses menuju permukiman dan layak hidup - Peningkatan KIE = terhadap program ketransmigrasian

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Adapun gambaran rancangan akhir RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan OPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah dapat dilihat pada **TABEL T-C.31 (terlampir)**.

Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.37.276.809.729,- yang terdiri dari 9 program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.33.048.569.248 yang terdiri dari 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja sebesar Rp.206.442.250,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp.2.059.767.450,- yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp.662.422.050,- yang terdiri dari 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
5. Program Hubungan Industrial sebesar Rp.974.910.300,- yang terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan.
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar Rp.249.998.900,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp.32.499.900,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp.64.999.900,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp.29.999.950,- yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat adalah suatu sistem perencanaan yang dikenal dengan “ **bottom up planning** “. Artinya bahwa suatu perencanaan program maupun kegiatan betul-betul merupakan aspirasi dari masyarakat dan tentunya program kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu.

Pemerintah melalui serangkaian kegiatan perencanaan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional selalu berusaha mengakomodasi setiap usulan program/kegiatan dengan tetap memperhatikan aturan yang ada sekaligus kemampuan anggaran.

Penelaahan ini juga merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota, yang secara rinci dapat dilihat pada **TABEL T-C.32 sebagai berikut :**

Tabel 2.4
T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Prov Sulsel

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		% Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan % Besaran tenaga kerja yang dilatih dapat mandiri		
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	10 Paket	volume dan anggaran menyesuaikan alokasi provinsi berdasarkan skala prioritas
			Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan bagi pencaker	10 Kelompok	- volume, anggaran dan lokasi menyesuaikan alokasi provinsi berdasarkan skala prioritas
			Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pembinaan KUM	10 Kelompok	- volume, anggaran dan lokasi menyesuaikan alokasi provinsi berdasarkan skala prioritas
2.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Saprasi LPK	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas tahun n	60 Lembaga	volume, anggaran dan lokasi menyesuaikan alokasi provinsi
3	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	15 UKM/Dokumen	volume, anggaran dan lokasi menyesuaikan alokasi provinsi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja adalah perangkat manajemen yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Disamping itu, Rencana Kerja juga merupakan rencana yang di susun berdasarkan analisis situasi di dalam dan di luar organisasi yang berfokus pada manajemen penetapan tujuan – tujuan yang ingin di capai dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program dan Kegiatan yang diuraikan dalam Renja ini, terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu :

- a. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 prioritas nasional tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yaitu :

1. PN 1 = Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial
 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan
2. PN 2 = Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. PN 3 = PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, maka tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;
2. Mengoptimalkan Penanganan Masalah Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Sebagaimana dipahami bahwa selain tujuan, penetapan sasaran Rencana Kerja (RENJA) juga sangat penting karena merupakan proses perumusan pelaksanaan pembangunan yang strategis dan bertujuan untuk melaksanakan tugas – tugas pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengolahan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
3. Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi
4. Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja
5. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal
6. Meningkatnya produktivitas perusahaan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan pekerja / buruh
7. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja / buruh

3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Pencapaian SDGS
 - c. PUG melalui Analisis Responsif Gender (ARG)

Untuk membahas faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas selaku penanggung jawab OPD beserta sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, yaitu **TABEL IKU** dibawah ini :

Tabel 3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

Visi Kepala Daerah	Misi Kepala Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran/Program Pada Tahun Ke -		
					2024	2025	2026
“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter ”	(1) Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan Berkarakter	(1) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	(1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	- Nilai Sakip OPD	- 80 %	- 81 %	- 84 %
	(3) Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	(2) Mengoptimalkan Pengembangan, Pencegahan dan Penanganan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	(2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja	94 %	95 %	96 %
			(3) Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Persentase perkembangan kawasan transmigrasi	49.3 %	52,99 %	54,03 %
			(4) Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja, pelaku usaha dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktifitas tenaga kerja	Rp.85.000.000	Rp.85.500.000	Rp.85.900.000

			(5) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal	Jumlah penyerapan tenaga kerja	35.000 orang	40.000 orang	45.000 orang
			(6) Meningkatnya HI yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dalam rangka terwujudnya kelangsungan berusaha dan bekerja	Persentase kenaikan upah per tahun	5.2 %	5.4 %	5.6 %
			(7) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan norma kerja dan norma K3	- Persentase penanganan kasus norma ketenagakerjaan - Persentase pembinaan norma K3	- 80% -80%	- 85% -85%	- 90% -90%

Tabel 3.2
INDIKATOR KINERJA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Akhir 2022	Target Capaian		
					2024	2025	2026
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	49,43	50	52	54
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	43,18	43,20	45,10	44,10
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	35,78	38,33	40,39	40,86
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	91,73	1,98	2,85	86,63
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	4,68	4,60	4,55	4,50
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	3,73	4	4,25	4,50
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	15,45	16,30	16,80	17,20
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	49,43	50	52	54

Disamping itu, dalam penyusunan program kegiatan juga harus memuat isu penyusunan Analisis Responsif Gender (ARG). ARG sekurang-kurangnya meliputi :

- Memasukkan isu gender dalam isu strategis
- Program prioritas untuk mengatasi isu gender
- Memasukkan indikator gender dalam Indikator kinerja daerah

Alat analisis yang digunakan adalah :

- Menggunakan GDI dan GEM dalam evaluasi tahunan
- Prioritas dan sasaran pembangunan untuk menysasar isu gender
- Rencana program dan kegiatan prioritas : memasukkan program/kegiatan spesifik gender, afirmasi dan penguatan kapasitas serta mainstreaming dalam program secara umum
- Memasukkan isu gender sektoral dalam isu strategis
- Rencana Program : spesifik gender, afirmasi dan peningkatan kapasitas, serta mainstreaming dlm program umum
- Indikator kinerja responsif gender
- Kelompok sasaran : memasukkan kelompok rentan
- Evaluasi kinerja : GDI, GEM dan progress isu gender sector
- Program dan kegiatan : spesifik gender, afirmasi dan peningkatan kapasitas, serta mainstreaming dlm program umum
- Indikator kinerja responsif gender
- Menyasar kelompok rentan dalam kelompok sasaran

Selanjutnya program kegiatan yang direncanakan kemudian dilakukan ARG dengan menggunakan GAP (General Analysis Pathway) dan GBS (General Budgeting System) seperti pada **TABEL GAP dan GBS** dibawah ini :

Tabel 3.3 Matriks Gender Analysis Pathway (GAP) Disnakertrans Prov. Sulsel Tahun 2025

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama: Urusan, Sub Urusan, Program, Kegiatan, Tujuan kegiatan, Keluaran Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	Isu Gender			Rencana Kebijakan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
Urusan: Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sub Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Data BPS Agustus 2023 Data angkatan kerja = 4.694.483 orang L = 2.893.150 P= 1.801.333 ; Data penduduk bekerja =4.490.983 orang L= 2.766.126 P= 1.724.857 ; Data Pengangguran Terbuka : 203.500 L = 127.024 P = 76.476 ; Data TPAK = 65,66 % L= 82,22%	Akses : Pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja perempuan dan lowongan kerja untuk tenaga kerja perempuan sangat terbatas sehingga perempuan tidak memperoleh akses yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan	Para pejabat di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih banyak yang belum sepenuhnya memahami konsep gender, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan kurang mempertimbangan akses dan manfaat untuk laki-laki dan	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Data dan informasi ketenagakerjaan (lowongan dan	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Menyusun TOR sub kegiatan Menentukan lokasi kab/kota sasaran berdasarkan data ketenagakerjaan dan data sektoral dinas. Membentuk Tim Pelaksana Melakukan persiapan kegiatan	Data BPS Agustus 2023 Data angkatan kerja = 4.694.483 orang L = 2.893.150 P= 1.801.333 ; Data penduduk bekerja =4.490.983 orang L= 2.766.126 P= 1.724.857 ; Data Pengangguran Terbuka : 203.500 L =	Indikator Output: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n Indikator Outcome: (1) Meningkatnya kompetensi /ketrampilan/ke sejahteraan KUM, Disabilitas untuk berwirausaha

Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Tujuan Sub Kegiatan: Meningkatnya kompetensi /ketrampilan/kesejahteraan KUM, Disabilitas untuk berwirausaha berdasarkan kejuruan yang dilatih Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n Sasaran Sub Kegiatan: tenaga kerja (pencari kerja, penyandang disabilitas, dan kelompok usaha bersama) Program: Program Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan: Job Fair/Bursa Kerja	P= 49,62% ; Data TPT=4,33% L=4,39% P=4,25% ; Data Bidang Penempatan posisi Desember 2023 Data pencari kerja terdaftar sebanyak 41.104 orang L= 28.792 P= 12.312 ; Lowongan Tenaga Kerja Terdaftar sebanyak 16.226 L=12.572 P=3.654 Data Penempatan tenaga kerja sebanyak 33.216 orang L= 22.348 P= 10.868	pekerjaan Partisipasi : Laki-laki lebih banyak terserap di pasar kerja. Laki-laki lebih banyak hadir dalam kegiatan bursa kerja yang menyediakan berbagai lowongan pekerjaan Kontrol : Pengambilan keputusan seorang perempuan untuk bekerja masih dipengaruhi oleh faktor keluarga terutama suami sebagai kepala	perempuan secara adil dan proporsional Belum tersedia data terpilah yang lengkap untuk setiap kegiatan lingkup Disnakertrans Prov. Sulsel Belum tersedia pedoman/juklak/juknis tentang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang mempertimbangkan kepentingan laki-laki dan perempuan	penempatan) dari Dinas Kab/Kota dan Perusahaan yang lengkap, akurat dan terpilah		Menyusun TOR sub kegiatan Membentuk Tim Pelaksana Melakukan	127.024 P = 76.476 ; Data TPAK = 65,66 % L= 82,22% P= 49,62% ; Data TPT=4,33% L=4,39% P=4,25% ; Data Bidang Penempatan posisi Desember 2023 Data pencari kerja terdaftar sebanyak 41.104 orang L= 28.792 P= 12.312 ; Lowongan Tenaga Kerja Terdaftar sebanyak 16.226 L=12.572 P=3.654	berdasarkan kejuruan yang dilatih Indikator Output: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Indikator Outcome: (1) Kemudahan dalam
--	--	---	---	---	--	--	--	--

Tujuan Sub Kegiatan: Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi penempatan tenaga kerja Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Sasaran Sub Kegiatan: Pencari Kerja		keluarga sehingga perempuan tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri untuk bekerja				Koordinasi dengan perusahaan-perusahaan penyedia lowongan pekerjaan di Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kesetaraan jumlah peserta laki-laki dan perempuan secara proporsional Melakukan persiapan kegiatan Melaksanakan jobfair dengan memperhatikan kesetaraan jumlah pencari	Data Penempatan tenaga kerja sebanyak 33.216 orang L= 22.348 P= 10.868	memperoleh data dan informasi penempatan tenaga kerja
---	--	---	--	--	--	--	---	---

						kerja laki-laki dan perempuan secara proporsional		
						Menyusun laporan pelaksanaan sub kegiatan		

Catatan : Basis data menggunakan data tahun 2023

Tabel 3.4 Pernyataan Anggaran Gender
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
berdasarkan Klaster Kompetensi

PROVINSI/KABUPATEN-KOTA : PROVINSI SULAWESI SELATAN
 OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	ASPEK	URAIAN
1	Urusan. : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2	Output Sub Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n
3	Analisa situasi	Terjadinya kesenjangan gender, di mana perempuan dianggap tidak perlu bekerja sehingga lowongan pekerjaan yang terbuka untuk perempuan sangat terbatas. Pengetahuan, keterampilan, dan tingkat kompetensi tenaga kerja perempuan masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Berdasarkan data profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Data BPS Agustus 2023 Data angkatan kerja = 4.694.483 orang L = 2.893.150 P= 1.801.333 ; Data penduduk bekerja =4.490.983 orang L= 2.766.126 P= 1.724.857 ; Data Pengangguran Terbuka : 203.500 L = 127.024 P = 76.476 ; Data TPAK = 65,66 % L= 82,22% P= 49,62% ; Data TPT=4,33% L=4,39% P=4,25% ; Data Bidang Penempatan posisi Desember 2023 Data pencari kerja terdaftar sebanyak 41.104 orang L= 28.792 P= 12.312 ; Lowongan Tenaga Kerja Terdaftar sebanyak 16.226 L=12.572 P=3.654 Data Penempatan tenaga kerja sebanyak 33.216 orang L= 22.348 P= 10.868 Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja perempuan dan lowongan kerja untuk tenaga kerja perempuan sangat terbatas sehingga perempuan tidak memperoleh akses yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan Partisipasi : Laki-laki lebih banyak terserap di pasar kerja. Laki-laki lebih banyak hadir dalam kegiatan bursa kerja yang menyediakan berbagai lowongan pekerjaan Kontrol : Pengambilan keputusan seorang perempuan untuk bekerja masih dipengaruhi oleh faktor keluarga terutama suami sebagai kepala keluarga sehingga perempuan tidak bisa mengambil keputusan secara

		mandiri untuk bekerja b. Sebab Kesenjangan Internal Para pejabat di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih banyak yang belum sepenuhnya memahami konsep gender, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan kurang mempertimbangkan akses dan manfaat untuk laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional c. Sebab Kesenjangan Eksternal Faktor budaya patriarki dalam masyarakat Sulsel menyebabkan perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja, hanya mengurus rumah tangga. Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktivitas 1	Menyusun TOR sub kegiatan Tujuan : Panduan teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis gender
		Aktivitas 2	Menentukan lokasi kab/kota sasaran berdasarkan data ketenagakerjaan dan data sektoral dinas. Tujuan : Untuk mengatasi kesenjangan gender spesifik terkait penentuan peserta pelatihan di kab/kota
		Aktivitas 3	Membentuk Tim Pelaksana. Tujuan : Pembagian tugas tim untuk mencapai target indikator output dan outcome
		Aktivitas 4	Melakukan persiapan kegiatan. Tujuan : Mengatasi kesenjangan akses informasi bagi Tim Pelaksana sub kegiatan.
		Aktivitas 5	Melaksanakan pelatihan dengan memperhatikan kesetaraan jumlah peserta laki-laki dan perempuan secara proporsional. Tujuan : Mengatasi kesenjangan peserta pelatihan.
		Aktivitas 6	Menyusun laporan pelaksanaan sub kegiatan. Tujuan : Memberi informasi capaian output dan outcome dalam kontribusi mengatasi kesenjangan
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan (KUA/PPAS)		Rp 1.851.390.900,00
6	Dampak/hasil Output Sub Kegiatan (Langkah 9 GAP)		Meningkatnya kompetensi /ketrampilan/kesejahteraan KUM, Disabilitas untuk berwirausaha berdasarkan kejuruan yang dilatih

Tabel 3.5. Gender Budget Statement Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja

GENDER BUDGET STATEMENT

PROVINSI/KABUPATEN-KOTA : PROVINSI SULAWESI SELATAN
OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	ASPEK	URAIAN
1	Urusan. : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja
2	Output Sub Kegiatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
3	Analisa situasi	Terjadinya kesenjangan gender, di mana perempuan dianggap tidak perlu bekerja sehingga lowongan pekerjaan yang terbuka untuk perempuan sangat terbatas. Pengetahuan, keterampilan, dan tingkat kompetensi tenaga kerja perempuan masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Berdasarkan data profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Data BPS Agustus 2023 Data angkatan kerja = 4.694.483 orang L = 2.893.150 P= 1.801.333 ; Data penduduk bekerja =4.490.983 orang L= 2.766.126 P= 1.724.857 ; Data Pengangguran Terbuka : 203.500 L = 127.024 P = 76.476 ; Data TPAK = 65,66 % L= 82,22% P= 49,62% ; Data TPT=4,33% L=4,39% P=4,25% ; Data Bidang Penempatan posisi Desember 2023 Data pencari kerja terdaftar sebanyak 41.104 orang L= 28.792 P= 12.312 ; Lowongan Tenaga Kerja Terdaftar sebanyak 16.226 L=12.572 P=3.654 Data Penempatan tenaga kerja sebanyak 33.216 orang L= 22.348 P= 10.868 Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja perempuan dan lowongan kerja untuk tenaga kerja perempuan sangat terbatas sehingga perempuan tidak memperoleh akses yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan Partisipasi : Laki-laki lebih banyak terserap di pasar kerja. Laki-laki lebih banyak hadir dalam kegiatan bursa kerja yang menyediakan berbagai lowongan pekerjaan Kontrol : Pengambilan keputusan seorang perempuan untuk bekerja masih dipengaruhi oleh faktor keluarga terutama suami sebagai kepala keluarga sehingga perempuan tidak bisa mengambil keputusan secara

		mandiri untuk bekerja b. Sebab Kesenjangan Internal Para pejabat di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih banyak yang belum sepenuhnya memahami konsep gender, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan kurang mempertimbangkan akses dan manfaat untuk laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional c. Sebab Kesenjangan Eksternal Faktor budaya patriarki dalam masyarakat Sulsel menyebabkan perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja, hanya mengurus rumah tangga. Pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Aktivitas 1	Menyusun TOR sub kegiatan Tujuan : Panduan teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis gender
		Aktivitas 2	Membentuk Tim Pelaksana. Tujuan : Pembagian tugas tim untuk mencapai target indikator output dan outcome
		Aktivitas 3	Melakukan Koordinasi dengan perusahaan-perusahaan penyedia lowongan pekerjaan di Sulawesi Selatan dengan memperhatikan kesetaraan jumlah peserta laki-laki dan perempuan secara proporsional. Tujuan : Mengatasi kesenjangan penyediaan lowongan pekerjaan.
		Aktivitas 4	Melakukan persiapan kegiatan. Tujuan : Mengatasi kesenjangan akses informasi bagi Tim Pelaksana sub kegiatan.
		Aktivitas 5	Melaksanakan jobfair dengan memperhatikan kesetaraan jumlah pencari kerja laki-laki dan perempuan secara proporsional. Tujuan : Mengatasi kesenjangan peserta pelatihan.
		Aktivitas 6	Menyusun laporan pelaksanaan sub kegiatan. Tujuan : Memberi informasi capaian output dan outcome dalam kontribusi mengatasi kesenjangan
5	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan (KUA/PPAS)		Rp.225.527.900,00
6	Dampak/hasil Output Sub Kegiatan (Langkah 9 GAP)		Kemudahan dalam memperoleh data dan informasi penempatan tenaga kerja

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Terdapat 9 program dan 22 kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin OPD

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Kegiatan yang ada dalam program ini adalah penyusunan rencana tenaga kerja makro untuk prov/kab/kota dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro untuk perusahaan

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diperuntukkan bagi pencari kerja, kelompok usaha dan UKM dan dilaksanakan di kab/kota

d. Program Penempatan Tenaga Kerja

Menyediakan data dan informasi tentang pasar dan bursa kerja online, serta data ketenagakerjaan yang menyangkut AKAD, AKL, PMI, Disabilitas dan LTSA

e. Program Hubungan Industrial

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, maka perlu sinergi antara pemerintah/pengusaha/pekerja

f. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Kunci utama dalam pengawasan ketenagakerjaan adalah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam meerapkan norma K3

g. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini memfasilitasi penyediaan lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C 3L

h. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Penataan persebaran penduduk melalui pelaksanaan perpindahan dan penempatan transmigrasi.

i. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi berupa pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi yang ada di kawasan transmigrasi agar transmigran yang dibina dapat hidup lebih mandiri

3. Rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD

Program dan kegiatan semua telah sesuai dengan rancangan akhir RKPD hanya anggaran/pagu indikatif yang berubah. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dengan ketersediaan anggaran.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan **tabel T-C.33 (terlampir)**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengimplementasikan strategis organisasi. Rencana Kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran langkah–langkah yang diambil. Itulah sebabnya, Rencana Kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan disamping didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan juga disinkronisasikan terhadap program – program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, terdiri dari 9 program, 22 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.37.329.610.269,-. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di wilayah kab/kota sebanyak 4 UPT Wilayah, 1 UPT BPK, 4 bidang dan 1 sekretariat. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya yang disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut adalah rincian dan penjelasan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada tertuang pada Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
- Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

- Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Antar Kerja
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja
- Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- Kegiatan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi

5. Program Hubungan Industrial

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
 - Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
- Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
 - Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

- 6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
 - Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
 - Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- 7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**
- Kegiatan Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Sub Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Sub Kegiatan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**
- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi
 - Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
- 9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**
- Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
 - Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
 - Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman

Adapun rincian indikator kinerja program serta target yang ingin dicapai diuraikan sebagai berikut :

a). Bidang Sekretariat

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 Nilai
2	Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 Nilai
3	Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %

b). Bidang Ketenagakerjaan

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Provinsi/Kab/Kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro	75 %
2.	Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro	20 %

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Pencari Kerja Terlatih yang Mendapatkan Pekerjaan	87 %
2.	Persentase Tenaga Kerja dapat Berwirausaha	100 %

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Tabel 4.4. Program Penempatan Tenaga Kerja

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	9.6 %
2.	Persentase Daya Serap Tenaga Kerja	63.6 %

4) Program Hubungan Industrial

Tabel 4.5. Program Hubungan Industrial

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang Hubungan Industrial	63,75 %
2.	Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	47,68 %

5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Tabel 4.6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	55,87 %
2.	Meningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	100 %

c). Bidang Ketrasmigrasian.

1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Tabel 4.7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100,00 %

2) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tabel 4.8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Penempatan Transmigrasi	100,00 %

3) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 4.9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No	Uraian	Target Indikator Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Transmigran yang Dilatih Dapat Lebih Mandiri	100,00 %

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Sumber pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 hanya memuat usulan yang menggunakan APBD. Secara garis besar, jumlah usulan anggaran sebesar Rp.37.329.610.269,00.

Adapun rincian usulan masing-masing belanja per program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.10. Rencana Anggaran Belanja Program

NO	U R A I A N	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	191.442.250
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.059.767.450
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	662.422.050
4.	Program Hubungan Industrial	974.910.300
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	249.998.900
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	32.499.900
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	64999.900
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	29.999.950
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.048.569.248
J U M L A H		37.329.609.948

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disusun dengan tetap memperhatikan potensi, kemampuan dan peluang yang dimiliki. Renja ini dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang tertuang dalam Renstra OPD Tahun 2024-2026. Dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja nantinya, ketersediaan anggaran sangat berperan penting dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang menjadi program prioritas baik pemerintah daerah maupun OPD dan merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan bagi pemangku kepentingan (masyarakat dan swasta).

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan rencana kerja OPD, perlu ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan beserta bidang teknis dan UPTD wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuan dalam rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
- Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi bidang teknis dan UPTD dalam menyusun kebijakan terkait ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.
- Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka masing-masing bidang teknis dan UPTD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan pagu Tahun 2025.
- Pelaksanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan pembangunan yang mendukung visi misi kepala daerah, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.
- Pada akhir tahun anggaran 2025, OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan dan kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan.
- Dalam perencanaan program dan kegiatan OPD hendaknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan suatu daerah. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan

oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan kegiatan dan tugas–tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya dapat terwujud dengan kerja keras dan niat yang tulus untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Makassar, Agustus 2024

KEPALA DINAS



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19710510 199803 1 004

L A M P I R A N

TABEL T-C.29
REKAPITULASI DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100%	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00
						Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100%	100.00 Nilai	100.00 Nilai	100.00
						Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100.00 %	100.00 %	100.00
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu								
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja bulanan, triwulan dan tahunan yang disusun	17.00 Laporan	17.00 Laporan	17.00 Laporan	17.00 Laporan	100.00	17.00 Laporan	17.00 Laporan	100.00
2	07	01	1.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data dan informasi yang terpublikasi	11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.00 Laporan	100.00	11.00 Laporan	11.00 Laporan	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu								
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang tersedia/Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	190 Orang/Bln	190 Orang/Bln	190 Orang/Bln	190 Orang/Bln	100.00	190 Orang/Bln	190 Orang/Bln	100.00
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	1 Laporan	1 Laporan	100.00
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100.00	18 Laporan	18 Laporan	100.00
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN								
2	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya/Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	190 Dokumen 1 Laporan	190 Dokumen 1 Laporan	190 Dokumen 1 Laporan	190 Dokumen 1 Laporan	100.00 100.00	190 Dokumen 1 Laporan	190 Dokumen 1 Laporan	100.00 100.00
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor Perkantoran								
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	2.00 Paket	100.00	2.00 Paket	2.00 Paket	100.00
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah/Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	-	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	1 Unit	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan air, listrik dan internet/Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12.00 Laporan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor, Tenaga Keamanan dan Tenaga Pengemudi/Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.00
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik								
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional Roda 4 dan 2 yang terbayarkan/Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100.00	17 Unit	17 Unit	100.00
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	2 Unit	2 Unit	100.00
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	57 Unit	53 Paket	53 Paket	53 Paket	100.00	53 Unit	53 Unit	100.00
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Prov/Kab/Kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja makro	70 %	75 %	100 %	75 %	75	75 %	75 %	100.00
						Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja mikro	20 %	15 %	10 %	15 %	150	16 %	16 %	100.00
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi								
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Data dan informasi perencanaan tenaga kerja makro/Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kab/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	100	24 Orang	24 Orang	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	87 %	75 %	77.08 %	82 %	106.38	85 %	85 %	100.00
						% tenaga kerja dapat berwirausaha	100 %	80 %	85 %	100 %	118	100 %	100 %	100.00
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan bagi pencaker Jumlah anggota UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pembinaan KUM Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mengikuti pelatihan Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi Tersedianya pelayanan operasional UPT BPK								
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan bagi pencaker Jumlah anggota UKM yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas Jumlah kelompok usaha yang mengikuti pembinaan KUM Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mengikuti pelatihan	1280 Orang	880 Orang	920 Orang	880 Orang	95.65	920 Orang	920 Orang	100
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pelayanan dan Pembinaan UPTD BLK		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100			
2	07	03			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase meningkatnya produktivitas Perusahaan Menengah	65 %							
2	07	03	1.02	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	3 Prshn	3 Prshn	3 Prshn	3 Prshn	100	3 Prshn	3 Prshn	100
2	07	03			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Data dan Informasi pengukuran produktifitas tenaga kerja Jumlah anggota UKM yang mengikuti bimbingan konsultasi								
2	07	03			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 Dokumen	5 UKM	5 UKM	5 UKM	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
						Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Balai Pelatihan Kerja	12 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	9.6 %	9.69 %	4.35 %	9.69 %	222.76	9.5 %	9.5 %	100.00
						Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	63.6 %	62.82 %	59.41 %	62.82 %	105.74	63.3 %	63.3 %	100.00
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan Data dan informasi pasar dan bursa kerja di kab/kota								
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	500/50 Orang/Perusahaan	24.00 Kab/Kota	24.00 Kab/Kota	24.00 Kab/Kota	100.00	500/50 Orang/Perusahaan	500/50 Orang/Perusahaan	100.00
2	07	04	1.03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	746 Orang	746 Orang	746 Orang	100.00	5000 Orang	5000 Orang	100.00
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan penanganan PMI terpadu								
						Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	04	1.04	02	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50.00 Orang							
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Pelayanan Penanganan TKI Terpadu/Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA	200.00 Orang	246.00 Orang	246.00 Orang	246.00 Orang	100.00	200.00 Orang	200.00 Orang	100.00
2	07	04	1.06		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Data dan informasi penempatan tenaga kerja lokal, tenaga kerja imigran dan tenaga kerja asing di kab/kota	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	450.00 Orang	569.00 Orang	569.00 Orang	569.00 Orang	100.00	450.00 Orang	450.00 Orang	100.00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	63.75 %	63.38 %	58.00 %	63.38 %	109.28	60.00 %	60.00 %	100.00
						Persentase Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta jamsostek	47.68 %	49.43 %	46.81 %	49.43 %	105.60	47.22 %	47.22 %	100.00
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai	Tersedianya Data dan Informasi pelaksanaan Syarat-syarat Kerja di Perusahaan								
2	07	05	1.01	03	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan HI	Jumlah perusahaan yang menyusun PP dan terdaftar di WLKP Online	25.00 Prshn	25.00 Prshn	25.00 Prshn	25.00 Prshn	100.00	25.00 Prshn	25.00 Prshn	100.00
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran PKB yang terkait dengan HI	Jumlah perusahaan yang menyusun PKB dan terdaftar di WLKP Online	2.00 Prshn	2.00 Prshn	2.00 Prshn	2.00 Prshn	100.00	2.00 Prshn	2.00 Prshn	100.00
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kasus perselisihan HI perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan Fasilitasi TIM LKS Tripartit dalam mewujudkan HI yang kondusif								
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perselisihan yang dicegah	25 Perkara							
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	110 Kasus	110 Kasus	366 Kasus	332.73	50 Perkara	50 Perkara	100.00
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam mewujudkan hubungan industrial yang kondusif (Pengusaha, Pekerja, Pemerintah)/Jumlah LKS Tripartit yang dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100.00	3 Lembaga	3 Lembaga	100.00
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Unsur Pengusaha, Unsur Pekerja, Unsur Pemerintah) Jumlah pekerja yang mengikuti program jamsostek								
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Fasilitasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi/Jumlah Penetapan UMP	1.00 Surat Keputusan	1.00 Surat Keputusan	1.00 Surat Keputusan	1.00 Surat Keputusan	100.00	1.00 Surat Keputusan	1.00 Surat Keputusan	100.00
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1.00 Surat Keputusan	23.00 Orang	23.00 Orang	23.00 Orang	100.00	1.00 Surat Keputusan	1.00 Surat Keputusan	100.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jamsostek	100,000,000 Orang	1,168,024 Orang	95,000 Orang	1,168,024 Orang	1229.50	1000000 Orang	1000000 Orang	100.00
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	55.87 %	87.16 %	85.00 %	87.16 %	102.54	55.62 %	55.62 %	100.00
						Persentase Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan	100.00 %	84.29 %	84.00 %	84.29 %	100.35	100.00 %	100.00 %	100.00
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan Persentase permasalahan hukum yang tertangani Persentase pelayanan K3 di perusahaan Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja								
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	900 Pershn	6,324 Pershn	900 Pershn	6,324 Pershn	702.67	900 Pershn	900 Pershn	100.00
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	115.00 Kasus	102 Kasus	100 Kasus	102 Kasus	102.00	102 Kasus	102 Kasus	100.00
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	5,000 Prshn	3,833 Prshn	100 Prshn	3,833 Prshn	3,833.00	5,000 Prshn	5,000 Prshn	100.00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	32				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100 %	100 %	100 %	100 %	%	100 %	100 %	100.00
3	32				Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Data dan informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	32	02	1.01	000 1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	1 Dokumen							
3	32	02	1.01	000 2	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 Kasus					1 Kasus	1 Kasus	100.00
3	32	02	1.01	000 3	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1000 Ha	1694 Ha	1058 Ha	1694 Ha	160.11	1000 Ha	1000 Ha	100.00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Penempatan Transmigrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	100 %	100.00
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi	% Penempatan Transmigrasi								
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00	2 Laporan	2 Laporan	100.00
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 Dokumen							
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk	25 KK	40 KK	40 KK	40 KK	100.00	20 KK	20 KK	100.00
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 KK	160 KK	160 Orang	160 Orang	100.00	40 KK	40 KK	100.00
3	32	03	1.01	06	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Pembinaan Transmigrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00	100 %	100 %	100.00
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Ketersediaan data sarana dan prasarana								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Pemantapan	Jumlah aparaturnya ketransmigrasian yang mengikuti sosialisasi Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri								
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan	Jumlah KK transmigran yang dibina	50 KK	80 KK	80 KK	80 KK	100.00	40 KK	40 KK	100.00
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	2 SP							

Catatan :

Urusan Wajib/Pilihan
Bidang Tenaga Kerja/Transmigrasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Makassar, Agustus 2024

KEPALA DINAS



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710501 199803 1 004

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				37,202,110,198						37,202,110,198	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				37,202,110,198						37,202,110,198	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	100.00 100.00 100.00	33,048,569,248	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	100.00 100.00 100.00	33,048,569,248	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		305,472,100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		305,472,100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Terkait	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	181,472,100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Terkait		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	181,472,100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	17,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Laporan	30,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Laporan	30,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 Laporan	30,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		30,303,321,852	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		30,303,321,852	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	190 Orang/Bulan	30,168,322,252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	190 Orang/Bulan	30,168,322,252	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	124,999,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	124,999,600	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		105,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		105,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	190 Dokumen	105,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	190 Dokumen	105,000,000	
	Sosialisai peraturan perundang-undangan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	0	Sosialisai peraturan perundang-undangan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor Perkantoran		269,999,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah			% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor Perkantoran		269,999,800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	44,999,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	44,999,800	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan/Kementrian/Lembaga dan Provinsi terkait	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	12 Laporan	225,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Sulawesi Selatan/Kementrian/Lembaga dan Provinsi terkait		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	12 Laporan	225,000,000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7,734,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7,734,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit	7,734,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Unit	7,734,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,175,553,276	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,175,553,276	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	618,825,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	618,825,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	556,728,276	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	556,728,276	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		881,488,220	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		881,488,220	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	835,478,220	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	835,478,220	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sarana prasarana Gedung/ kantoratau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	57 Unit	46,010,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah sarana prasarana Gedung/ kantoratau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	53 Unit	46,010,000	
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase provinsi/kab/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja Makro Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja Mikro	100% 15%	206,442,250	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase provinsi/kab/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja Makro Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja Mikro	100% 15%	206,442,250	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kab/Kota	100% 100%	206,442,250	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja			% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kab/Kota	100% 100%	206,442,250	
	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	191,442,250	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	24 Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	25 Dokumen	191,442,250	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah SDM Kab/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	24 Orang	15,000,000	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	24 Kab/Kota	Jumlah SDM Kab/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	24 Orang	15,000,000	
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		% Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan % tenaga kerja yang dilatih berwawasan dapat mandiri	87 % 100 %	2,059,767,450	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			% Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan % tenaga kerja yang dilatih berwawasan dapat mandiri	85 % 100 %	2,059,767,450	
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Persentase meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas Persentase meningkatnya kompetensi instruktur	100% 100%	2,004,620,500	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Persentase meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas Persentase meningkatnya kompetensi instruktur	100% 100%	2,004,620,500	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tahun 2023	1280 Orang	1,851,390,900	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tahun 2023	920 Orang	1,851,390,900	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan supras pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun 2023	20 Lembaga	153,229,600	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan supras pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun 2023	20 Lembaga	153,229,600	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		Persentase meningkatnya produktivitas UKM	65%	10,146,950	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			Persentase meningkatnya produktivitas UKM	60%	10,146,950	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Perusahaan/UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	3 Perusahaan	10,146,950	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Perusahaan/UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	3 Perusahaan	10,146,950	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Tersedianya data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	100%	45,000,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			Tersedianya data dan informasi pengukuran produktivitas tenaga kerja	100%	45,000,000	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan/UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	12 Dokumen	45,000,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perusahaan/UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 Dokumen	45,000,000	
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	9.60%	662,422,050	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	9.50%	662,422,050	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase daya serap tenaga kerja	63.60%					Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	63.30%		
	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota		Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja	100%	55,000,000	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota			Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja		55,000,000	
	Pelayanan Antar Kerja	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	5000 Orang	55,000,000	Pelayanan Antar Kerja	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	50 Orang	55,000,000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tersedianya data dan informasi pasar dan bursa kerja di Kab/Kota	100%	262,432,350	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Tersedianya data dan informasi pasar dan bursa kerja di Kab/Kota	100%	262,432,350	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karierhub)	15000 Orang	36,904,450	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karierhub)	500 Orang	36,904,450	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	750 orang	225,527,900	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja	1500 orang	225,527,900	
	Hubungan PMI (Pro dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		Persentase meningkatnya kompetensi CPMI/PMI Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu	100% 100%	319,989,950	Hubungan PMI (Pro dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			Persentase meningkatnya kompetensi CPMI/PMI Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu	100% 100%	319,989,950	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50 Orang	0	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	100 Orang	-	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSa	150 Orang	319,989,950	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan		Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSa	100 Orang	319,989,950	
	Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi		Tersedianya data dan informasi TKA di Kab/Kota	100%	24,999,750	Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi			Tersedianya data dan informasi TKA di Kab/Kota	100%	24,999,750	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah TKA yang telah mendapatkan pengesahan RPTKA	450 Orang	24,999,750	Koordinasi dan sinkronisasi Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja didalam 1 daerah provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah TKA yang telah mendapatkan pengesahan RPTKA	100 Orang	24,999,750	
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di Bidang HI Persentase besaran peserta/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	63.75% 47.68%	974,910,300	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di Bidang HI Persentase besaran peserta/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	65.40% 50%	974,910,300	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Tersedianya data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan	100%	70,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			Tersedianya data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan	100%	70,000,000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan HI	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perusahaan yang menyusun PP dan terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	5,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan HI	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perusahaan yang menyusun PP dan terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan	5,000,000	
	Pendaftaran PKB yang terkait dengan HI	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perusahaan yang menyusun PKB dan terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	5,000,000	Pendaftaran PKB yang terkait dengan HI	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perusahaan yang menyusun PKB dan terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	5,000,000	
	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	1 Laporan	60,000,000	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek	1 Laporan	60,000,000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase kasus perselisihan HI perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan Fasilitasi TIM LKS Tripartit dalam mewujudkan HI yang kondusif	33% 100%	429,732,100	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			Persentase kasus perselisihan HI perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan Fasilitasi TIM LKS Tripartit dalam mewujudkan HI yang kondusif	33% 100%	429,732,100	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perselisihan yang dicegah	30 perkara	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perselisihan yang dicegah	20 perkara	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	56,841,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	50 perkara	56,841,000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan/Kementerian/Lembaga dan Provinsi terkait	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	3 Lembaga	372,891,100	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Provinsi Sulawesi Selatan/Kementerian/Lembaga dan Provinsi terkait		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	3 Lembaga	372,891,100	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial Fasilitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK	1.000.000 Orang 100%	475,178,200	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial Fasilitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK	100%	475,178,200	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Luar Prov. Sulsel/Prov. Sulsel	Jumlah penetapan UMP	1 SK	420,178,200	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Luar Prov. Sulsel/Prov. Sulsel		Jumlah penetapan UMP	1 SK	420,178,200	
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Luar Prov. Sulsel/Prov. Sulsel	Jumlah penetapan UMK	1 SK	0	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Luar Prov. Sulsel/Prov. Sulsel		Jumlah penetapan UMK	1 SK	-	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumah tenaga kerja yang terdaftar dalam program Jamsos Ketenagakerjaan	1.000.000 orang	55,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumah tenaga kerja yang terdaftar dalam program Jamsos Ketenagakerjaan	100.000 orang	55,000,000	
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		% Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Peningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	55.87% 100%	249,998,900	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			% Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Peningkatnya kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	86% 100%	249,998,900	
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan Persentase permasalahan hukum yang tertangani Persentase pelayanan K3 di perusahaan Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	16% 100% 100% 100%	249,998,900	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan Persentase permasalahan hukum yang tertangani Persentase pelayanan K3 di perusahaan Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	16% 100% 100% 100%	249,998,900	
	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang mempekerjakan TKA)	5000 Perusahaan	169,999,500	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di perusahaan (termasuk perusahaan yang mempekerjakan TKA)	900 Perusahaan	169,999,500	
	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	120 Kasus	49,999,400	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah kasus permasalahan hukum yang diselesaikan	120 Kasus	49,999,400	
	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	3500 perusahaan	30,000,000	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	66 perusahaan	30,000,000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDKATIF (Rp)	Catatan Penting
							Lokasi	Usulan Masyarakat yang diakomodir				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				127,499,750	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					127,499,750	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				127,499,750	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					127,499,750	
7	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diidentifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100%	32,499,900	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diidentifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	100%	32,499,900	
	Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Tersedianya data dan informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi	100%	32,499,900	Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi			Tersedianya data dan informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi	100%	32,499,900	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjakan dengan daerah lain	1 dokumen	19,999,900	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjakan dengan daerah lain	1 dokumen	19,999,900	
	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 Kasus	0	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan		Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 Kasus	-	
	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	1000Ha	12,500,000	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan		Luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	1000Ha	12,500,000	
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Penempatan Transmigrasi	100%	64,999,900	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase Penempatan Transmigrasi	100%	64,999,900	
	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi		Tersedianya data dan informasi pembangunan kawasan transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyaluran Calon TPS dan Monitoring dan Evaluasi)	100%	64,999,900	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi			Tersedianya data dan informasi pembangunan kawasan transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyaluran Calon TPS dan Monitoring dan Evaluasi)	100%	64,999,900	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Prov. Sulsel (Daerah pengirim/daerah penerima)	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	2 Laporan	15,000,050	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Prov. Sulsel		Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	2 Laporan	15,000,050	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 dokumen	0	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kawasan/Lokasi Transmigrasi		Jumlah dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 dokumen	-	
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	Jumlah verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi TPS	25 KK	9,999,900	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kawasan/Lokasi Transmigrasi		Jumlah verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi TPS	25 KK	9,999,900	
	Penyaluran Transmigrasi	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyaluran	40 KK	29,999,850	Penyaluran Transmigrasi	Kawasan/Lokasi Transmigrasi		Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyaluran	40 KK	29,999,850	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 Lokasi	10,000,100	Penyaluran Transmigrasi	Lokasi Transmigrasi		Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 Lokasi	10,000,100	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Dilatih dapat Lebih Mandiri	100%	29,999,950	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase Transmigran yang Dilatih dapat Lebih Mandiri	100%	29,999,950	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan		Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan transmigran Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	100% 100%	29,999,950	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan transmigran Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	100% 100%	29,999,950	
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lokasi Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang dibina	50 KK	25,000,000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lokasi Transmigrasi		Jumlah KK transmigran yang dibina	75 KK	25,000,000	
	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lokasi Transmigrasi	Jumlah SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	2 SP	4,999,950	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Lokasi Transmigrasi		Jumlah SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	3 SP	4,999,950	
J U M L A H					37,329,609,948	J U M L A H					37,329,609,948	

Catatan :
Urusan Wajib/Pilihan
Bidang Tenaga Kerja/Transmigrasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan

Makassar, Agustus 2024

KEPALA DINAS



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19710501 199801 1 004

TABEL T-C.33 (RANCANGAN AKHIR RENJA)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37,202,110,198.0				41,756,050,447.0
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				37,202,110,198.0				41,756,050,447.0
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah Nila Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti		100 100 100%	33,048,569,248.0			100 100 100%	33,220,020,447.0
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu		100%	305,472,100.00			100%	462,000,000.00
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Terkait	2 Dokumen	181,472,100			2 Dokumen	315,000,000.00
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	17,000,000			1 Dokumen	18,375,000.00
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	15,750,000.00
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	17,000,000			1 Dokumen	18,375,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	15,750,000.00
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	17 Laporan	30,000,000			17 Laporan	42,000,000.00
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	11 Laporan	30,000,000			11 Laporan	36,750,000.00
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%	30,303,321,852.0			100%	30,196,350,000.0
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	190 Orang/Bulan	30,168,322,252			190 Orang/Bulan	30,000,000,000.00
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	10,000,000			1 Laporan	10,500,000.00
					Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Dokumen	0			2 Dokumen	5,250,000
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	18 Laporan	124,999,600			18 Laporan	180,600,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN		100%	105,000,000.00			100%	178,500,000.00
2	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	190 Dokumen	105,000,000			190 Dokumen	147,000,000.00
2	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	50 Orang	0			60 Orang	31,500,000.00
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor Perkantoran		100%	269,999,800.00			100%	425,685,750.00
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	2 Paket	44,999,800			2 Paket	56,085,750.00
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	225,000,000			12 Laporan	264,600,000.00
2	07	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Dokumen	0			1 Dokumen	105,000,000.00
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	7,734,000.00			100%	26,250,000.00
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	7,734,000			1 Unit	26,250,000.00
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1,175,553,276.00			100%	1,143,397,340.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	618,825,000			12 Laporan	649,766,250.00
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Sulawesi Selatan	12 Laporan	556,728,276			12 Laporan	493,631,090.00
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		100%	881,488,220.0			100%	787,837,357.0
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Provinsi Sulawesi Selatan	17 Unit	835,478,220			17 Unit	739,526,857.00
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana Gedung/kantoratau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	57 Unit	46,010,000			57 Unit	48,310,500.00
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase provinsi/kab/kota yang menyusun perencanaan tenaga kerja Makro		70%	191,442,250.00			100%	148,000,000.00
						Persentase perusahaan yang menyusun perencanaan tenaga kerja Mikro		20%	15,000,000.00			24%	15,750,000.00
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	% Pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi		100%	191,442,250.00			100%	148,000,000.00
						Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kab/Kota		100%	15,000,000.00			100%	15,750,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	1 Dokumen	191,442,250			1 Dokumen	148,000,000.00
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kab/Kota yang mengikuti pelatihan penyusunan RTK Mikro	Prov. Sulsel dan Kementerian Ketenagakerjaan	24 Orang	15,000,000			24 Orang	15,750,000.00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% Pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	87 %		2,059,767,450.00			90%	5,662,230,000.00
						% tenaga kerja dapat berwirausaha	100 %					100%	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja/UKM/KUM/Disabilitas Persentase meningkatnya kompetensi Instruktur	100% 100%		2,004,620,500.00			100% 100%	5,525,730,000.00
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan	1280 Orang	1,851,390,900			960 Orang	5,446,980,000.00
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	20 Lembaga	153,229,600			20 Lembaga	78,750,000.00
2	07	03			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase meningkatnya produktivitas Perusahaan Menengah		65%	10,146,950.00			70%	31,500,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	03	1.02	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	3 Perusahaan	10,146,950			3 Perusahaan	31,500,000.00
2	07	03			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Data dan Informasi pengukuran produktifitas tenaga kerja		100%	45,000,000.00			100%	105,000,000.00
2	07	03	1.03	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen	45,000,000.00			12 Dokumen	105,000,000.00
						Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Balai Pelatihan Kerja	Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	12 Dokumen				12 Dokumen	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan		9.60%	662,422,050.000			9.70%	703,500,000.000
						Persentase daya serap tenaga kerja		63.60%				63.75%	
2	07	04	1.02		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja		100%	55,000,000.0			100%	26,250,000.0
2	07	04	1.02	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Provinsi Sulawesi Selatan	5000 Orang	55,000,000			5000 Orang	26,250,000.00
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Data dan informasi lowongan kerja di perusahaan		100%	262,432,350.0			100%	147,000,000.0
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Provinsi Sulawesi Selatan	15000 Orang	36,904,450			15000 Orang	42,000,000.00
2	07	04	1.03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	750 orang	225,527,900			1500 orang	105,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya kompetensi CPMI/PMI Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu	100% 100%		319,989,950.0			100% 100%	498,750,000.0
2	07	04	1.04	02	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan	50 Orang	0			50 Orang	52,500,000.00
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Makassar, Pare-Pare, Kementerian Ketenagakerjaan	200 Orang	319,989,950			200 Orang	446,250,000.00
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan lokasi kerja ddalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya data dan informasi TKA di Kab/Kota		100%	24,999,750.00			100%	31,500,000.00
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Provinsi Sulawesi Selatan	450 Orang	24,999,750			450 Orang	31,500,000.00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan di Bidang HI Persentase besaran peserta/buruh yang menjadi peserta Jamsostek		63.75% 47.68%	974,910,300.00			64% 47.88%	1,103,550,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan		100%	70,000,000.00				92,400,000.00
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan HI	Jumlah perusahaan yang menyusun PP dan terdaftar di WLKP Online	Provinsi Sulawesi Selatan	25 Perusahaan	5,000,000			35 Perusahaan	10,500,000.00
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran PKB yang terkait dengan HI	Jumlah perusahaan yang menyusun PKB dan terdaftar di WLKP Online	Provinsi Sulawesi Selatan	2 Perusahaan	5,000,000			8 Perusahaan	10,500,000.00
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Laporan	60,000,000			1 Laporan	71,400,000.00
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase kasus perselisihan HI perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan Fasilitasi TIM LKS Tripartit dalam mewujudkan HI yang kondusif		35% 100%	429,732,100.00			37% 100%	496,650,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perselisihan yang dicegah	Provinsi Sulawesi Selatan	25 perkara	0			25 perkara	36,750,000.00
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Provinsi Sulawesi Selatan	50 perkara	56,841,000			50 perkara	68,250,000.00
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Provinsi Sulawesi Selatan/Kementerian /Lembaga dan Provinsi terkait	3 Lembaga	372,891,100			3 Lembaga	391,650,000.00
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial Fasilitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK		1.000.000 Orang 100%	475,178,200.00			1.000.000 Orang 100%	514,500,000.00
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Luar Prov. Sulsel/Prov. Sulsel	1 Surat Keputusan	420,178,200			1 Surat Keputusan	441,000,000.00
2	07	05	1.03	02	Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Surat Keputusan	0			1 Surat Keputusan	15,750,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Provinsi Sulawesi Selatan	1000000 orang	55,000,000			1000000 orang	57,750,000.00
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Penurunan resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja		55.87%	249,998,900.00			56.12%	903,000,000.00
						Persentase Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan		100%				100%	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan		16%	249,998,900.00			17%	903,000,000.00
						Persentase permasalahan hukum yang tertangani		100%				100%	
						Persentase pelayanan K3 di perusahaan		100%				100%	
						Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja		100%					
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Provinsi Sulawesi Selatan	5000 Perusahaan	169,999,500			5000 Perusahaan	630,000,000.00
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Provinsi Sulawesi Selatan	115 Kasus	49,999,400			110 Kasus	152,250,000.00
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Provinsi Sulawesi Selatan	5000 perusahaan	30,000,000			5000 perusahaan	120,750,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				127,499,750.0				424,326,000.0
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				127,499,750.0				424,326,000.0
3	32				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan		100%	32,499,900.00			100%	77,826,000.00
3	32	02	1.01		Pencadangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya data dan informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi		100%	32,499,900.00			100%	77,826,000.00
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang bisa dibangun dan dikerjasamakan dengan daerah lain	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	1 dokumen	19,999,900			1 dokumen	21,000,000.00
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	1 Kasus	0			1 Kawasan	21,000,000
3	32	02	1.01	03	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi yang di Provinsi Sulawesi Selatan	1000Ha	12,500,000			1000Ha	35,826,000.00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	% Penempatan Transmigrasi		100%	64,999,900.00			100%	241,500,000.00
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah propinsi	Tersedianya data dan informasi pembangunan kawasan transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyuluhan Calon TPS dan Monitoring dan Evaluasi)		100%	64,999,900.0			100%	241,500,000.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov. Sulsel (Daerah pengirim/daerah penerima)	2 Laporan	15,000,050			2 Laporan	47,250,000.00
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	2 dokumen	0			2 dokumen	57,750,000.00
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	25 KK	9,999,900			25 KK	31,500,000.00
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kawasan/Lokasi Transmigrasi	40 KK	29,999,850			40 KK	63,000,000.00
3	32	03	1.01	06	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi Transmigrasi	4 Lokasi	10,000,100			4 Lokasi	42,000,000
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dilatih dapat Lebih Mandiri		100%	29,999,950.00			100%	105,000,000.00
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan transmigran Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan		100% 100%	29,999,950.00				105,000,000.00
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah KK transmigran yang dibina	Lokasi Transmigrasi	50 KK	25,000,000			75 KK	52,500,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Lokasi Transmigrasi	2 SP	4,999,950			3 SP	52,500,000.00
J U M L A H									37,329,609,948.00				42,180,376,447.0

Catatan :

Urusan Wajib/Pilihan

Bidang Tenaga Kerja/Transmigrasi

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

MAKASSAR, AGUSTUS 2024

KEPALA DINAS



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710501 199803 1 004